

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 26 February 2020



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia Halaman 20	Selasa, 26 February 2020	Properti Dituding Biang Keladi	Pembangunan properti yang tidak sesuai dengan peruntukannya dinilai menjadi salah satu biang keladi banjir yang kembali melanda Jakarta. Terlebih, pada Selasa (25/2) sejumlah warga yang tinggal di luar kawasan hunian Jakarta Garden City di Cakung, Jakarta Timur, menggeruduk Aeon Mall yang berada di dalam kawasan tersebut. Warga menduga bahwa banjir yang melanda di kawasan itu akibat dari pembangunan mal dan hunian Jakarta Garden City. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan bahwa penyebab banjir di Jakarta bisa saja akibat pembangunan properti, tetapi hal itu tidak bisa dipukul rata.
2	Bisnis Indonesia Halaman 4	Selasa, 26 February 2020	Kebutuhan Dana Membengkak	Kebutuhan dana untuk merealisasikan proyek dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 membengkak. Dalam Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp6.555 triliun. Jumlah dana itu naik dibandingkan dengan RPJMN 2014-2019 yang senilai Rp5.519 triliun. Padahal, pada akhir 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksikan kebutuhan RPJMN 2020-2024 mencapai Rp6.421 triliun. "Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek prioritas strategis nasional [major project] sebesar Rp6.555 triliun. Dana tersebut untuk membangun 1.592 proyek," kata Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan dari kementerian PPN/Bappenas Leonard Tampubolon, Senin (24/2).
3	Tempo Halaman 3	Selasa, 26 February 2020	Banjir dan Solusi Tak Berkesudahan	Belum genap 2 bulan berjalan, pada tahun ini banjir sudah tiga kali menghantam sebagian besar wilayah Jakarta dan sekitarnya. Teranyar, banjir kembali melanda disebabkan curah hujan lebat hingga ekstrem yang terjadi pada Senin (24/2) pukul 07.00 WIB sampai dengan Selasa (25/2) pukul 07.00 WIB. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menunturkan telah menggelar tender pengadaan pompa di daerah Sentiong dan Ancol. Basuki juga memastikan penanggulangan dampak banjir Jakarta dan pencegahannya akan dikerjakan semua pihak terkait, yakni pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Suhanto menyatakan perlu pengawasan yang ketat terkait ketersediaan

				stok dan pasokan pangan. Hal tersebut untuk mengantisipasi gangguan transportasi dan logistik kala terjadi banjir. Banjir memang bisa menghantam dan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian. Mencari solusi pun tak semudah menunjuk kambing hitam. Sekarang, yang paling penting, kesiapan dan respons menghadapinya.
4	Tempo Halaman 3	Selasa, 26 February 2020	Bah Melimpas Lebih Luas	Ini kali pertama Kawasan di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, itu terendam banjir. Bahkan, saat sebagian Jakarta terendam banjir besar 1 Januari lalu, daerah Mandor Iren relatif kering. “Kali ini semua kena,” kata Borgias Da Silva, 34 tahun, warga RT 001 RW 09 Sunter Jaya. Arsitek dari Institut Teknologi Bandung, Yu Sing, mengatakan kunci penanggulangan banjir Jakarta adalah penegakan tata ruang untuk resapan banjir. Dia menyebut sederet program besar, termasuk normalisasi Ciliwung serta pembangunan waduk di kawasan hulu yang digarap pemerintah pusat, tidak akan mempan tanpa perbaikan sistem penyerapan hujan. Yu Sing mengatakan tanah Betawi telah jadi langganan banjir sejak zaman Gubernur Jenderal Belanda, Jan Pieterszoon Coen, berkuasa. Padahal, dia melanjutkan, Jakarta, yang saat itu bernama Batavia, memiliki RTH dan ruang terbuka biru-berupa situ dan sebagainya-mencapai 80 persen. Angka itu menciut menjadi kurang 10 persen saat ini. “Mal-mal dibangun di daerah resapan dengan bangunan tinggi dan punya banyak basement,” kata dia. “Tak heran muncul kawasan banjir baru.” Bertubi-tubi terhantam banjir, pemerintah DKI memangkas dana RTH dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 sebesar Rp 300 miliar. Padahal jumlah ruang hijau milik pemerintah Jakarta baru 9,9 persen, atau paling mentok 14,7 persen jika ditambah milik swasta. Hal itu tak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Ruang, yang mewajibkan DKI minimal memiliki ruang sebesar 30 persen dari total 661,5 kilometer persegi wilayahnya.
5	Tempo Halaman 7	Selasa, 26 February 2020	Pemerintah Integrasikan Penanganan Papua	Jaleswari (Deputi V Kantor Staf Presiden) mengatakan selama ini upaya pemerintah menangani berbagai persoalan di Papua belum terintegrasi. Dia mencontohkan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan hanya menangani masalah keamanan. Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional hanya mencakup kesejahteraan masyarakat. Begitu pun dengan kementerian dan Lembaga lainnya. Ia mengatakan semua pembangunan maupun penanganan hak asasi manusia harus dilakukan

				secara terpadu. Pemerintah juga telah menggelar rapat Desk Papua Terpadu yang melibatkan sejumlah kementerian dan Lembaga negara. Dalam rapat itu juga disinggung mengenai penanganan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengatakan rencana penyatuan desk itu akan diakomodasi dengan menerbitkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat,” katanya. Mahfud memberi contoh jika Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib membangun jalan raya. PT Pertamina juga harus membangun tempat pengisian bahan bakar kendaraan, Kemenko polhukam harus menjamin keamanannya, dan seterusnya. “Itu yang Namanya holistik. Kalau sendiri-sendiri itu kadang kala hilang.”
--	--	--	--	---

Judul	Properti Dituding Biang Keladi	Tanggal	Selasa, 26 February 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 20		
Resume	Pembangunan properti yang tidak sesuai dengan peruntukannya dinilai menjadi salah satu biang keladi banjir yang kembali melanda Jakarta. Terlebih, pada Selasa (25/2) sejumlah warga yang tinggal di luar kawasan hunian Jakarta Garden City di Cakung, Jakarta Timur, menggeruduk Aeon Mall yang berada di dalam kawasan tersebut. Warga menduga bahwa banjir yang melanda di kawasan itu akibat dari pembangunan mal dan hunian Jakarta Garden City. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan bahwa penyebab banjir di Jakarta bisa saja akibat pembangunan properti, tetapi hal itu tidak bisa dipukul rata.		

| BANJIR JAKARTA |

Properti Dituding Biang Keladi

Bisnis, JAKARTA — Pembangunan properti yang tidak sesuai dengan peruntukannya dinilai menjadi salah satu biang keladi banjir yang kembali melanda Jakarta.

Terlebih, pada Selasa (25/2) sejumlah warga yang tinggal di luar kawasan hunian Jakarta Garden City di Cakung, Jakarta Timur, menggeruduk Aeon Mall yang berada di dalam kawasan tersebut.

Warga menduga bahwa banjir yang melanda di kawasan itu akibat dari pembangunan mal dan hunian Jakarta Garden City.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan bahwa penyebab banjir di Jakarta bisa saja akibat pembangunan properti, tetapi hal itu tidak bisa dipukul rata.

“Properti yang dibangun di atas lahan ruang terbuka hijau [RTH] atau daerah resapan air yang akan berdampak banjir.”

Dia mencontohkan ketika permukiman di Kelapa Gading bisa dilanda banjir karena dibangun di atas rawa-rawa. Artinya, pembangunan itu sebetulnya tidak sesuai dengan peruntukannya.

Nirwono juga menyatakan bahwa penyelesaian tata ruang sebetulnya sangat penting. Namun, Pemprov DKI malah melegalkan pembangunan atau merevitalisasi kampung-kampung di atas lahan RTH.

Pakar tata ruang dari Institut Teknologi Bandung Deni Zulkaidi juga menyatakan bahwa pembangunan properti tidak bisa sepenuhnya disalahkan meski di sisi lain hal itu termasuk salah satu faktor.

“Faktor penyebab banjir Jakarta bukan hanya itu [pembangunan properti], masih banyak lagi,” tuturnya.

Dia pun memandang banjir Jakarta akibat dari kurangnya bidang resapan air seperti dari RTH, koefisien daerah hijau

(KDH), kemudian saluran air alias drainase.

Sementara itu, Sekjen Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai pengembangan ber-konsep *transit oriented development* (TOD) menjadi yang paling bisa menjadi pilihan di tengah Jakarta yang rawan banjir.

“TOD paling menarik, menurut saya, karena ketika ada bencana seperti ini warganya tetap bisa bergerak menggunakan transportasi umum.”

Oleh karena dekat dengan transportasi umum, warga yang tinggal di hunian tersebut tidak perlu bergantung pada kendaraan pribadi untuk pergi ke kantor.

Belum lagi, properti berkonsep TOD umumnya merupakan bangunan vertikal sehingga pemiliknya lebih aman dan nyaman ketika ada banjir. (Ilham Budhiman/Mutiara Nabila)

Judul	Kebutuhan Dana Membengkak	Tanggal	Selasa, 26 February 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 4		
Resume	Kebutuhan dana untuk merealisasikan proyek dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 membengkak. Dalam Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp6.555 triliun. Jumlah dana itu naik dibandingkan dengan RPJMN 2014-2019 yang senilai Rp5.519 triliun. Padahal, pada akhir 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksikan kebutuhan RPJMN 2020-2024 mencapai Rp6.421 triliun. "Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek prioritas strategis nasional [major project] sebesar Rp6.555 triliun. Dana tersebut untuk membangun 1.592 proyek," kata Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan dari kementerian PPN/Bappenas Leonard Tampubolon, Senin (24/2).		

| RPJMN 2020-2024 |

Kebutuhan Dana Membengkak

Bisnis, JAKARTA – Kebutuhan dana untuk merealisasikan proyek dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 membengkak.

Dalam Perpres No. 18/2020 tentang RPJMN 2020—2024, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp6.555 triliun. Jumlah dana itu naik dibandingkan dengan RPJMN 2014—2019 yang senilai Rp5.519 triliun.

Padahal, pada akhir 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi kebutuhan untuk RPJMN 2020—2024 mencapai Rp6.421 triliun.

"Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek prioritas strategis nasional [major project] sebesar Rp6.555 triliun. Dana tersebut untuk membangun 1.592 proyek," kata Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan dari Kementerian

PPN/Bappenas Leonard Tampubolon, Senin (24/2).

Berdasarkan data Bappenas, anggaran yang disiapkan kementerian atau lembaga untuk pembangunan *major project* berkisar Rp1.185 triliun. Pemerintah juga menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dukungan pemerintah daerah sebesar Rp412,9 triliun.

Sumber pendanaan terbesar berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), BUMN, atau swasta masyarakat senilai Rp4.814,9 triliun. Sisanya berasal dari subsidi atau *public service obligation* (PSO) Rp142,5 triliun.

"Untuk pendanaan di kementerian lembaga telah diindikasikan belanja nonoperasional jangka menengah sebagai acuan penyusunan target pembangunan."

Ekonom Institute for Deve-

lopment of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, kebutuhan anggaran yang tertuang dalam RPJMN tidak realistis. Sebab, tingginya kebutuhan anggaran karena pemerintah mengacu pada target pertumbuhan di kisaran 5,6%—6%.

"Faktanya dengan penyebaran virus corona dan ketidakpastian dagang sulit mencapai target 6%. Kemungkinan di kisaran 4,3%—4,8%. Pemerintah seharusnya merevisi karena pembiayaan turunan dari target *growth* PDB," katanya, Selasa (25/2).

Dia mengungkapkan, ketidakpastian ekonomi global membuat investor asing bermain aman. Bhima khawatir jika pemerintah memaksa pendanaan lebih besar dari APBN, akan membuat beban utang makin berat. *(Feni Freycinetia)*

Judul	Banjir dan Solusi Tak Berkesudahan	Tanggal	Selasa, 26 February 2020
Media	Bisnis Indonesia Halaman 1		
Resume	Belum genap 2 bulan berjalan, pada tahun ini banjir sudah tiga kali menghantam sebagian besar wilayah Jakarta dan sekitarnya. Teranyar, banjir kembali melanda disebabkan curah hujan lebat hingga ekstrem yang terjadi pada Senin (24/2) pukul 07.00 WIB sampai dengan Selasa (25/2) pukul 07.00 WIB. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menunturkan telah menggelar tender pengadaan pompa di daerah Sentiong dan Ancol. Basuki juga memastikan penanggulangan dampak banjir Jakarta dan pencegahannya akan dikerjakan semua pihak terkait, yakni pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Suhanto menyatakan perlu pengawasan yang ketat terkait ketersediaan stok dan pasokan pangan. Hal tersebut untuk mengantisipasi gangguan transportasi dan logistik kala terjadi banjir. Banjir memang bisa menghantam dan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian. Mencari solusi pun tak semudah menunjuk kambing hitam. Sekarang, yang paling penting, kesiapan dan respons menghadapinya.		

Banjir dan Solusi Tak Berkesudahan

Dewi Zuhriyah & Rinaldi M. Azka
redaksi@bisnis.com

Belum genap 2 bulan berjalan, pada tahun ini banjir sudah tiga kali menghantam sebagian besar wilayah Jakarta dan sekitarnya. Teranyar, banjir kembali melanda disebabkan curah hujan lebat hingga ekstrem yang terjadi pada Senin (24/2) pukul 07.00 WIB sampai dengan Selasa

(25/2) pukul 07.00 WIB.

Stasiun Meteorologi Kemayoran mencatat curah hujan tertinggi mencapai 278 mm/hari. Alhasil, sungai meluap dan status beberapa pintu air naik menjadi siaga.

Hingga Selasa (25/2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta menyatakan, masih terdapat 294 RW atau 10,74% dari total RW di Ibu Kota yang terendam.

Adapun, jumlah pengungsi

mencapai 3.565 jiwa yang tersebar di 40 lokasi.

Banjir yang terjadi kali ini bahkan disebut berpengaruh sangat besar kepada dunia usaha jika dibandingkan dengan banjir yang terjadi pada tahun baru 2020. Alasannya, bencana ini terjadi pada hari kerja dengan area terdampak yang lebih merata.

Ekonom Indef Nailul Huda menilai, banjir yang telah tiga kali melanda Jakarta sejak awal

tahun menyebabkan kerugian ekonomi baik langsung dan tidak mencapai lebih kurang Rp3 triliun. Kenaikan harga bahan pokok pun turut membayangi karena terganggunya proses distribusi barang.

"Pasti akan berdampak karena inflasi biasanya naik seiring adanya kejadian banjir."

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menambahkan, sektor ritel dan industri manufaktur dipastikan

menanggung kerugian. Akses ke pusat-pusat perbelanjaan, restoran, dan terhambatnya distribusi barang dari kawasan industri.

Kondisi di sektor pariwisata pun tak ubahnya seperti jatuh tertimpa tangga. Belum selesai dengan ancaman penyebaran virus corona, musibah banjir berpotensi membuat pelaku usaha di sektor ini merana.

• **Bersambung** ➤ 3

Harga eceran **Rp11.000/eks** Untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Kawasan Timur Indonesia **Rp12.000/eks**

Perkiraan kerugian tersebut turut diutarakan oleh para pelaku usaha masing-masing sektor.

Di sektor logistik, misalnya, Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) Muslan memperkirakan kerugian pengusaha akibat banjir yang merendam sejumlah depo kontainer bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

"Jumlah kerugian bagi pengusaha depo kontainer di DKI Jakarta saja mencapai Rp32 miliar dalam 2 hari dan perbaikan lapangan sekitar Rp225 miliar," tuturnya.

Akibat kejadian ini, Asdeki berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir untuk meminimalkan permasalahan gangguan distribusi kontainer atau barang.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menjelaskan sedikitnya 20.000 unit truk milik pengusaha jasa ekspedisi barang di Jakarta tidak bisa beroperasi.

Para pengusaha truk menderita kerugian yang ditaksir berkisar Rp30 miliar per hari akibat tidak bisa beroperasinya armada jasa pengiriman barang.

Adapun, kerugian tersebut belum termasuk kerusakan barang akibat terendam banjir. "Satu unit bisa sampai Rp20 juta—Rp30 juta kalau kena mesinnya," katanya.

Di sektor ritel, banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya telah menekan jumlah pengunjung secara signifikan.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat menyatakan, jumlah pengunjung mal turun hingga 50% akibat banjir yang terjadi kemarin. Rata-rata, jumlah pengunjung mal di Jakarta sekitar 30.000 hingga 50.000 orang per hari.

Senada, Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah juga menyatakan terjadi penurunan jumlah pengunjung pusat perbelanjaan dan ritel.

Dia memproyeksikan banjir yang terjadi tiga kali sejak awal tahun mengakibatkan penurunan omzet sekitar 20%.

"Sepi penjualan. *Traffic* pengunjung menurun separuh," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pe-

rusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies/ASITA) Budijanto Ardiansjah mengungkapkan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun lokal diprediksi turun 10% hingga 20% akibat banjir.

"Akses Jakarta dan kota-kota lain juga terganggu sehingga pariwisata kawasan Jakarta Raya dan Bandung pasti terganggu," ujarnya.

Belum cukup sampai di situ, dampak banjir pun merembet ke sektor properti.

Ketua Umum Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Lukas Bong menyatakan, Jakarta atau daerah lain yang terkena banjir pasti berdampak pada terkoreksinya harga hunian.

Menurutnya, hal itu berkaca pada pengalaman sebelumnya saat banjir melanda sejumlah kawasan, khususnya Jakarta pada awal tahun ini, yang berimbas pada turunnya harga properti.

Adapun wilayah yang pasti mengalami penurunan harga adalah perumahan di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, yang sering terendam saat curah hujan tinggi.

"Belum terlihat [berapa persen penurunan], tapi pastinya akan lebih susah jual jika tidak ada koreksi harga," tuturnya.

Pada saat kondisi seperti saat ini, Lukas mengaku strategi pemasaran yang disusun adalah mau tidak mau mengalihkan sementara penjualan ke sektor apartemen.

Terpisah, Sekjen Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono mengatakan jika banjir terjadi hanya sekali, pengaruhnya minim.

Namun, jika terjadi berkali-kali dalam waktu singkat seperti tahun ini, pasti besar pengaruhnya.

"Dengan kondisi banjir ini, sekarang salah satu pertimbangan orang beli rumah itu tentang banjir atau enggak. Masyarakat juga sudah mulai tahu daerah mana saja yang banjir, mana yang aman," tuturnya.

TURUN TANGAN

Tak ingin tinggal diam melihat banjir yang terjadi kali ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turun tangan.

Direktur Jenderal Pengendalian

Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (PPRPT) Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang menilai, ada permasalahan tata ruang, yakni ketersediaan lahan hijau yang harus segera dibenahi.

Jadi, pihaknya akan mengaudit tata ruang bangunan-bangunan dari hulu ke hilir, terutama di daerah Puncak, Bogor.

"Menurut informasi, di hulu ada persoalan juga karena di Puncak sudah banyak lahan hijau yang menjadi vila. Kami berencana mau menanam kembali [pohon]. Yang kami syaratkan cuma 20% [ruang terbuka hijau/RTH] sesuai tata ruangnya," jelasnya.

Dia memastikan akan melakukan penindakan tegas melalui pembongkaran semua vila yang dibangun tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku.

Budi tak segan mengakui bahwa banyaknya bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan tata ruang dikarenakan kontrol yang terlambat dari pemerintah.

"Sebenarnya kalau kita lihat data-nya, mereka [pemilik vila] membeli dari masyarakat yang dulu menggarap tanah-tanah negara. Kami juga salah dari dulu *enggak* urus, sekarang akan kami tata kembali," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan telah menggelar tender pengadaan pompa di daerah Sentiong dan Ancol.

Basuki juga memastikan pengendalian dampak banjir Jakarta dan pencegahannya akan dikerjakan semua pihak terkait, yakni pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Suhanto menyatakan perlu pengawasan yang ketat terkait ketersediaan stok dan pasokan pangan.

Hal tersebut untuk mengantisipasi gangguan transportasi dan logistik kala terjadi banjir.

Banjir memang bisa menghantam dan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian.

Mencari solusi pun tak semudah menunjuk kambing hitam. Sekarang, yang paling penting, kesiapan dan respons semua pihak terkait dalam menghadapinya. *(Ism Fathimah Timorria/Itham Budhiman/Mutiara Nabila/Aziz Rahardyan)*

(Ism Fathimah Timorria/Itham Budhiman/Mutiara Nabila/Aziz Rahardyan)

Judul	Bah Melimpas Lebih Luas	Tanggal	Selasa, 26 February 2020
Media	Tempo Halaman 3		
Resume	Ini kali pertama Kawasan di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, itu terendam banjir. Bahkan, saat sebagian Jakarta terendam banjir besar 1 Januari lalu, daerah Mandor Iren relatif kering. “Kali ini semua kena,” kata Borgias Da Silva, 34 tahun, warga RT 001 RW 09 Sunter Jaya. Arsitek dari Institut Teknologi Bandung, Yu Sing, mengatakan kunci penanggulangan banjir Jakarta adalah penegakan tata ruang untuk resapan banjir. Dia menyebut sederet program besar, termasuk normalisasi Ciliwung serta pembangunan waduk di kawasan hulu yang digarap pemerintah pusat, tidak akan mempan tanpa perbaikan sistem penyerapan hujan. Yu Sing mengatakan tanah Betawi telah jadi langganan banjir sejak zaman Gubernur Jenderal Belanda, Jan Pieterszoon Coen, berkuasa. Padahal, dia melanjutkan, Jakarta, yang saat itu bernama Batavia, memiliki RTH dan ruang terbuka biru-berupa situ dan sebagainya-mencapai 80 persen. Angka itu menciut menjadi kurang 10 persen saat ini. “Mal-mal dibangun di daerah resapan dengan bangunan tinggi dan punya banyak basement,” kata dia. “Tak heran muncul kawasan banjir baru.” Bertubi-tubi terhantam banjir, pemerintah DKI memangkas dana RTH dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 sebesar Rp 300 miliar. Padahal jumlah ruang hijau milik pemerintah Jakarta baru 9,9 persen, atau paling mentok 14,7 persen jika ditambah milik swasta. Hal itu tak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Ruang, yang mewajibkan DKI minimal memiliki ruang sebesar 30 persen dari total 661,5 kilometer persegi wilayahnya.		

LAPORAN UTAMA

Bah Melimpas Lebih Luas

Banjir di Jakarta meluas. Minimnya ruang hijau, masifnya pembangunan infrastruktur, hingga jenuhnya penyerapan air dituding sebagai penyebabnya.

EDISI, 26 FEBRUARI 2020



Banjir di Underpass Senen, Jakarta, kemarin. TEMPO/Muhammad Hidayat

JALAN Mandor Iren, Sunter Jaya, bersalin rupa menjadi kolam renang anak, kemarin. Belasan bocah bermain air di genangan setinggi 30 sentimeter, diawasi para ibu. Luapan Kali Sunter juga menyulap lapangan sepak bola di Wisma Salesian Don Bosco, di belakang pabrik mobil Toyota, menjadi kolam raksasa sedalam 50 sentimeter.

BERITA TERKAIT

Bah Melimpas Lebih Luas

Ramai-ramai Menyalahkan Air dari Langit

Mengingat Melimpas Lebih Luas

Ini kali pertama kawasan di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, itu terendam banjir. Bahkan, saat sebagian Jakarta terendam banjir besar 1 Januari lalu, daerah Mandor Iren relatif kering. "Kali ini semua kena," kata Borgias Da Silva, 34 tahun, warga RT 001 RW 09 Sunter Jaya.

Borgias, guru sekolah swasta yang selama tujuh tahun terakhir tinggal di kawasan itu, hanya bisa menerka-nerka penyebab banjir: hujan deras selama delapan jam atau sejak pukul 23.00 WIB, Senin malam lalu. Menurut dia, intensitas hujan saat itu jauh lebih kuat dibanding pada malam pergantian tahun lalu, yang turun sekitar pukul 01.00 sampai 06.00 WIB. "Yang kemarin, hingga pagi masih deras," ujar dia.

Danang Wijanarko, Lurah Sunter Agung-daerah di sebelah utara Sunter Jaya-mengatakan 60 persen dari 7 kilometer persegi wilayah kerjanya terkena dampak banjir. Air melimpas dari Danau Sunter dan Kali Sentiong, menggenang setinggi 5 sampai 30 sentimeter. Padahal daerah itu bebas banjir pada 1 Januari lalu, sama seperti Sunter Jaya. Sementara tetangga mereka di sebelah timur, Kelapa Gading, terendam hingga setinggi satu meter. "Sempat ada genangan, tapi langsung surut," ujarnya.

Danang menampik dugaan drainase buruk sebagai penyebab banjir. Menurut dia, pekerja penanganan sarana dan prasarana umum (PPSU) rutin mengeruk sampah dan lumpur di Danau dan Kali Sunter, serta Kali Sentiong, sejak November silam. Dia menunjuk air dari langit sebagai biang keladi. "Hujan lebat membuat kali meluap," katanya. Begitu banjir menerjang, Danang melanjutkan, petugas PPSU mengaktifkan pompa untuk mengalihkan air dan membangun tanggul dadakan untuk menghambat limpasan dari sungai ke jalan.

Banjir juga menghantam aktivitas bisnis di Jalan Cempaka Putih Raya, Jakarta Pusat. Toko, warung makan, dan perkantoran di sana tutup akibat air setinggi 30 sentimeter yang hampir merata. Hanya beberapa kantor yang tetap beroperasi dengan generator pribadi, setelah PLN memadamkan listrik sejak pagi hingga pukul 17.15 WIB.

Arsitek dari Institut Teknologi Bandung, Yu Sing, mengatakan kunci penanggulangan banjir Jakarta adalah penegakan tata ruang untuk resapan banjir. Dia menyebut sederet program besar, termasuk normalisasi Ciliwung serta pembangunan waduk di kawasan hulu yang digarap pemerintah pusat, tidak akan mempan tanpa perbaikan sistem penyerapan hujan.

Yu Sing mengatakan tanah Betawi telah jadi langganan banjir sejak zaman Gubernur Jenderal Belanda, Jan Pieterszoon Coen, berkuasa. Padahal, dia melanjutkan, Jakarta, yang saat itu bernama Batavia, memiliki RTH dan ruang terbuka biru-berupa situ dan sebagainya-mencapai 80 persen. Angka itu menciut menjadi kurang dari 10 persen saat ini. "Mal-mal dibangun di daerah resapan dengan bangunan tinggi dan punya banyak basement," kata dia. "Tak heran muncul kawasan banjir baru."

Bertubi-tubi terhantam banjir, pemerintah DKI memangkas dana RTH dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 sebesar Rp 300 miliar. Padahal jumlah ruang hijau milik pemerintah Jakarta baru 9,9 persen, atau paling mentok 14,7 persen jika ditambah milik swasta. Hal itu tak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Ruang, yang mewajibkan DKI minimal memiliki ruang sebesar 30 persen dari total 661,5 kilometer persegi wilayahnya.

Ditemui di Pintu Air Manggarai, kemarin, Gubernur Anies Baswedan enggan berkomentar tentang penyebab banjir. Dia hanya menyebut Jakarta diterpa hujan dengan intensitas ekstrem yang menyebabkan 200 rukun warga (RW) terendam banjir. Pemerintah, dia menyatakan, saat ini berfokus pada penanganan korban banjir. "Anda berdiskusi (apa) sebabnya. Saya bekerja untuk menuntaskan dampaknya," kata Anies. **GANGSAR PARIKESIT | IMAM HAMDI | FRANSISCO ROSARIANS**

Judul	Pemerintah Integrasikan Penanganan Papua	Tanggal	Selasa, 26 February 2020
Media	Tempo Halaman 7		
Resume	Jaleswari (Deputi V Kantor Staf Presiden) mengatakan selama ini upaya pemerintah menangani berbagai persoalan di Papua belum terintegrasi. Dia mencontohkan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan hanya menangani masalah keamanan. Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional hanya mencakup kesejahteraan masyarakat. Begitu pun dengan kementerian dan Lembaga lainnya. Ia mengatakan semua pembangunan maupun penanganan hak asasi manusia harus dilakukan secara terpadu. Pemerintah juga telah menggelar rapat Desk Papua Terpadu yang melibatkan sejumlah kementerian dan Lembaga negara. Dalam rapat itu juga disinggung mengenai penanganan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengatakan rencana penyatuan desk itu akan diakomodasi dengan menerbitkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat," katanya. Mahfud memberi contoh jika Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib membangun jalan raya. PT Pertamina juga harus membangun tempat pengisian bahan bakar kendaraan, Kemenko polhukam harus menjamin keamanannya, dan seterusnya. "Itu yang Namanya holistik. Kalau sendiri-sendiri itu kadang kala hilang."		

PERISTIWA

Pemerintah Integrasikan Penanganan Papua

Pemerintah Indonesia berniat mengintegrasikan desk penanganan persoalan di Papua dari semua lembaga dan kementerian menjadi satu untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

EDISI, 26 FEBRUARI 2020



Peserta Program Perekrutan Bersama (PPSB) BUMN Papua dan Papua Barat di Jakarta, 22 Februari lalu. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

JAKARTA - Pemerintah Indonesia berniat mengintegrasikan desk penanganan persoalan di Papua dari semua lembaga dan kementerian menjadi satu untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. "Selama ini pendekatan tentang Papua tersebar di beberapa kementerian/lembaga berupa desk-desk Papua," kata Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, di Jakarta, kemarin.

BERITA TERKAIT

Penularan Covid-19 Meningkat di Luar Cina

Eks Diktator Mesir Husni Mubarak Mangkat

Jaleswari mengatakan selama ini upaya pemerintah menangani berbagai persoalan di Papua belum terintegrasi. Dia mencontohkan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan hanya menangani masalah keamanan. Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional hanya mencakup kesejahteraan masyarakat. Begitu pun dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Berita Lainnya

by  Dable

- Bank Sentral dan Pemerintah Rancang Strategi Mendongkrak...
- Masa Observasi WNI Awak Diamond Princess Lebih Lama - Nasional
- Tips Membagi Waktu Antara Kerja Dan Bisnis Sampingan
- Olimpiade Tokyo 2020 Tak Akan Ditunda - Olah Raga
- KPK Kaji Penghapusan Hasil Penyadapan 36 Perkara - Nasional
- Salah Tembak Omnibus Law Cipta Kerja - Opini

Credible

Ia mengatakan semua pembangunan maupun penanganan hak asasi manusia harus dilakukan secara terpadu. Pemerintah juga telah menggelar rapat Desk Papua Terpadu yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga negara. Dalam rapat itu juga disinggung mengenai penanganan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengatakan rencana penyatuan desk itu akan diakomodasi dengan menerbitkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. "Agar holistik, kemungkinan agar disatukan, di bawah satu lembaga," katanya.

Mahfud memberi contoh jika Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib membangun jalan raya. PT Pertamina juga harus membangun tempat pengisian bahan bakar kendaraan, Kemenkopolhukam harus menjamin keamanannya, dan seterusnya. "Itu yang namanya holistik. Kalau sendiri-sendiri itu kadang kala hilang." **AHMAD FAIZ | FRISKI RIANA**